

MODERNISASI IALAH RASIONALISASI BUKAN WESTERNISASI

Oleh Nurcholish Madjid

Pendahuluan

Tulisan ini dimaksudkan sekadar ikut memberikan sumbangan kecil dalam rangka menjelaskan makna “modernisasi”, yang akhir-akhir ini menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat. Lebih-lebih lagi, disebabkan adanya tulisan-tulisan dan percakapan-percakapan yang menimbulkan kesan seolah-olah di kalangan masyarakat ada suatu golongan yang hendak menghalangi modernisasi. Malahan terkesan pula, benar tidaknya terserah kepada sumber-sumber tulisan dan percakapan tersebut — seakan-akan golongan yang akan menghalangi modernisasi itu umat Islam, termasuk para mahasiswa Islam. Padahal dengan ukuran tertentu, mahasiswa merupakan lapisan yang lebih terpelajar (baca: rasional) daripada masyarakat. Sehingga kedudukan mahasiswa yang juga sering disebut sebagai “*the nation’s best human material*” itu, justru sebagai “*modernizing agent*”. Termasuk di kalangan umat Islam itu ialah HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).

Sudah barang tentu diharapkan, bahwa masalah yang menyangkut kata “modernisasi” menjadi semakin jelas dan gamblang, sehingga masing-masing yang bersangkutan mengetahui tempatnya. Kemudian, setelah itu dapat dibina saling pengertian yang dinamis dan konstruktif.

Modernisasi: Tinjauan Islami

Pengertian yang mudah tentang modernisasi ialah pengertian yang identik, atau hampir identik, dengan pengertian rasionalisasi. Dan hal itu berarti proses perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak akliah (rasional), dan menggantikannya dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang akliah. Kegunaannya ialah untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang maksimal. Hal itu dilakukan dengan menggunakan penemuan mutakhir manusia di bidang ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan, tidak lain adalah hasil pemahaman manusia terhadap hukum-hukum obyektif yang menguasai alam, ideal dan material, sehingga alam ini berjalan menurut kepastian tertentu dan harmonis. Orang yang bertindak menurut ilmu pengetahuan (ilmiah), berarti ia bertindak menurut hukum alam yang berlaku. Oleh karena itu ia tidak melawan hukum alam, malahan menggunakan hukum alam itu sendiri, maka ia memperoleh daya guna yang tinggi. Jadi, sesuatu dapat disebut modern, kalau ia bersifat rasional, ilmiah, dan bersesuaian dengan hukum-hukum yang berlaku dalam alam. Sebagai contoh: sebuah mesin hitung termmodern dibuat dengan rasionalitas yang maksimal, menurut penemuan ilmiah yang terbaru, dan karena itu, persesuaiannya dengan hukum alam paling mendekati kesempurnaan.

Bagi seorang Muslim, yang sepenuhnya meyakini kebenaran Islam sebagai *way of life*, semua nilai dasar *way of life* yang menyeluruh itu tercantum dalam Kitab Suci al-Qur'an. Akan tetapi, tidaklah pada tempatnya di sini memaparkan kesemuanya, meskipun untuk memperoleh pemahaman yang sempurna, sebenarnya sangat diperlukan. Maka sebagai penganut *way of life* Islam (dalam rangka beragama "Islam"), dengan sendirinya juga menganut cara berpikir Islami. Demikianlah, dalam menetapkan penilaian tentang modernis, juga berorientasi kepada nilai-nilai besar Islam. Singkatnya penulis berpendapat, begitu pula orang-orang yang sebangsa dengan penulis, bahwa modernisasi adalah suatu keharusan, malahan kewajiban yang

mutlak. Modernisasi merupakan pelaksanaan perintah ajaran Tuhan Yang Mahaesa. Dan modernisasi yang dimaksudkan di sini ialah menurut pengertian di atas. Dasar sikap itu ialah sebagai berikut:

- a. Allah menciptakan seluruh alam ini dengan *haqq* (benar), bukan *bāthil* (palsu) (Q 16:3; Q 38:27).
- b. Dia mengaturnya dengan peraturan Ilahi (sunatullah) yang menguasai dan pasti (Q 7:54; Q 25: 2).
- c. Sebagai buatan Tuhan Maha Pencipta, alam ini adalah baik, menyenangkan (mendatangkan kebahagiaan duniawi) dan harmonis (Q 21:7; Q 67:3).
- d. Manusia diperintah oleh Allah untuk mengamati dan menelaah hukum-hukum yang ada dalam ciptaan-Nya (Q 10:101).
- e. Allah menciptakan seluruh alam raya untuk kepentingan manusia, kesejahteraan hidup dan kebahagiaan, sebagai rahmat dari-Nya. Akan tetapi, hanya golongan manusia yang berpikir atau berasional yang akan mengerti dan kemudian akan memanfaatkan karunia itu (Q 45:13).
- f. Karena adanya perintah untuk mempergunakan akal pikiran (rasio) itu, maka Allah melarang segala sesuatu yang menghambat perkembangan pemikiran, yaitu terutama berupa pewarisan membuta terhadap tradisi-tradisi lama, yang merupakan cara berpikir dan tata kerja generasi sebelumnya (Q 2:170; Q 43:22-25).

Dengan demikian, kiranya menjadi mantaplah keyakinan kita, bahwa modernisasi, yang berarti rasionalisasi untuk memperoleh daya guna dalam berpikir dan bekerja yang maksimal, guna kebahagiaan umat manusia, adalah perintah Tuhan yang imperatif dan mendasar. Modernisasi berarti berpikir dan bekerja menurut fitrah atau sunnatullah (hukum Ilahi) yang *haqq* (sebab, alam adalah *haqq*).

Sunnatullah telah mengejawantahkan dirinya dalam hukum alam, sehingga untuk dapat menjadi modern, manusia harus

mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu (perintah Tuhan). Pemahaman manusia terhadap hukum-hukum alam, melahirkan ilmu pengetahuan, sehingga modern berarti ilmiah. Dan ilmu pengetahuan diperoleh manusia melalui akalnyanya (rasional), sehingga modern berarti ilmiah, berarti pula rasional.

Maksud sikap rasional ialah memperoleh daya guna yang maksimal untuk memanfaatkan alam ini bagi kebahagiaan manusia. Oleh karena manusia — karena keterbatasan kemampuannya — tidak dapat sekaligus mengerti seluruh hukum alam ini, melainkan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu, maka menjadi modern adalah juga berarti progresif dan dinamis. Jadi tidak dapat bertahan kepada sesuatu yang telah ada (*status quo*), dan karena itu bersifat merombak dan melawan tradisi-tradisi yang terang-terang tidak benar, tak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam hukum alam, tidak rasional, tidak ilmiah, sekalipun di pihak lain juga ada keharusan menerima dan meneruskan, kemudian mengembangkan warisan generasi sebelumnya yang mengandung nilai kebenaran. Maka sekalipun bersikap modern (*to be modern*) itu suatu keharusan yang mutlak, namun kemodernan (*modernity*) itu sendiri relatif sifatnya, sebab terikat oleh ruang dan waktu.

Sesuatu yang sekarang ini dikatakan modern, dapat dipastikan menjadi kolot (tidak modern lagi) di masa yang akan datang. Sedangkan yang modern secara mutlak ialah yang benar secara mutlak, yaitu Tuhan Yang Mahaesa, pencipta seluruh alam (*Rabb al-‘ālamīn*). Jadi, modernitas berada dalam suatu proses, yaitu proses penemuan kebenaran-kebenaran yang relatif, menuju ke penemuan Kebenaran Yang Mutlak, yaitu Allah. Itulah sebabnya Allah berfirman:

“Akan Kami (Allah) perlihatkan kepada manusia ayat-ayat (hukum-hukum) Kami, baik di seluruh cakrawala maupun dalam diri mereka sendiri, sehingga menjadi terang bagi mereka bahwa dia (al-Qur’an) itu benar adanya. Tidak cukupkah Tuhanmu itu menjadi saksi atas segala sesuatu?” (Q 41:52).

Jadi, tujuan akhir (*ultimate truth*), yaitu Tuhan itu sendiri, atau boleh juga disebut Kebenaran Ilahi.

Hal itu berarti bahwa tidak ada seorang pun manusia berhak mengklaim suatu kebenaran insani sebagai suatu kebenaran mutlak, kemudian dengan sekuat tenaga mempertahankan kebenaran yang dianutnya itu dari setiap perombakan. Sebaliknya, karena menyadari kerelatifan kemanusiaan, maka setiap orang harus bersedia dengan lapang dada menerima dan mendengarkan suatu kebenaran dari orang lain. Dengan demikian, terjadilah proses kemajuan terus-menerus dari kehidupan manusia, sesuai dengan *fithrah* (kejadian asal yang suci) manusia itu sendiri, dan sejalan dengan wataknya yang *hanif* (mencari dan merindukan kebenaran). Seharusnya seorang Muslim adalah seorang yang paling mendalam kesadarannya akan kemanusiaannya yang relatif. Dan memang demikian keadaannya. Seorang Muslim adalah seseorang yang dengan ikhlas mengaku bahwa dirinya adalah makhluk yang *dla'if* (lemah, tidak berdaya) di hadapan Tuhan. Keinsyafan itu terpatери dalam jiwa seorang Muslim, oleh karena Tuhan mewajibkannya untuk menundukkan kepala dan bersujud kepada-Nya, *al-Haqq al-muthlaq*, lima kali sehari, sekurang-kurangnya. Oleh karena itu, seharusnya pula seorang Muslim adalah seorang yang paling tidak bersedia untuk mempertahankan kebenaran-kebenaran insani sebagai sesuatu yang mutlak, sehingga menjadi reaksioner, menentang segala perubahan nilai-nilai (kemanusiaan).

Dengan perkataan lain, seorang Muslim semestinya menjadi seorang yang selalu bersedia menerima kebenaran-kebenaran baru dari orang lain, dengan penuh rasa tawadu' (*tawadldlu'*, *andap-asor*) kepada Tuhan. Apalagi Nabi Muhammad sendiri menegaskan, bahwa setiap kebenaran adalah barang hilangnya seorang Muslim. Maka barang siapa menemuinya, di mana saja dan kapan saja, hendaknya dia memungutnya, dan bahwa kebenaran itu harus dicari di mana saja adanya, "sekalipun harus ke negeri Cina". Jadi, seorang Muslim adalah seorang yang senantiasa modern, maju, progresif, terus-menerus mengusahakan perbaikan-perbaikan bagi

diri dan masyarakatnya. Dan inilah yang disebut *ihsān* (harfiah: memperbaiki), salah satu dari dua perintah Tuhan dalam firman-Nya: “*Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu akan keadilan dan ihsān,*” (Q 16:90).

Demikianlah modernitas (kemodernan, sikap modern), yang tampaknya hanya mengandung kegunaan praktis yang langsung, tapi pada hakikatnya mengandung arti yang lebih mendalam lagi, yaitu pendekatan kepada Kebenaran Mutlak, kepada Allah. Jadi agaknya mengejutkan, bahwa modernitas membawa kepada pendekatan (*taqarrub*) dan takwa kepada Tuhan Yang Mahaesa. Sudah barang tentu, kesemuanya itu adalah setelah dilandasi dengan keimanan kepada Tuhan Yang Mahaesa.

Demikianlah sifat modernitas, dan demikian pula sifat ilmu pengetahuan yang menjadi unsur mutlakinya. Ilmu pengetahuan, selain memberikan kegunaan-kegunaan praktis, juga dikejar, karena kekuatannya untuk mengantarkan manusia ke keinsyafan yang lebih mendalam tentang alam raya ini. Keinsyafan mendalam ialah keinsyafan bertuhan, yaitu rasa takwa kepada Tuhan Yang Mahaesa. Keinsyafan itu, dengan baik sekali, diungkapkan oleh Einstein dengan kata-katanya: Emosi paling indah dan paling mendalam yang dapat kita alami ialah rasa mistis. Ia merupakan kekuatan semua ilmu pengetahuan yang benar. Seseorang, yang baginya emosi itu terasa asing, yang tidak lagi dapat mengagumi dan bergembira dalam suatu kedahsyatan, adalah lebih baik mati saja. Untuk mengetahui bahwa apa yang tidak tertembus oleh kita benar-benar ada, yang menyatakan dirinya sebagai kebijaksanaan tertinggi dan keindahan paling cemerlang yang kemampuan terbatas kita (bodoh) ini dapat memahaminya hanya dalam bentuknya yang paling primitif — pengetahuan ini, perasaan ini berada dalam inti sari keagamaan yang benar.

Agaknya Einstein, seorang ahli fisika terbesar abad ini, dan karena itu merupakan bapak ilmu pengetahuan modern sekarang ini, sekalipun tidak merasa perlu memasuki suatu kelompok agama secara formal, disebabkan kurang serasinya agama-agama formal

yang diketahuinya dengan jalan pikirannya, menjadi seorang ilmuwan (rasional) yang sangat religius.

Bagi seorang Muslim yang menyadari akan keadaan Islam sebagai ajaran yang benar-benar *self-consistent* secara rasional, ditinjau dari nilai-nilai fundamentalnya (*ushūliyah*, bukan *furū'iyah*), semenjak dari dasar konsepsi teologisnya sampai masalah-masalah *way of life*-nya, tentu perkataan Einstein itu bukan suatu hal yang baru. Sebab hal itu telah diterangkan dalam al-Qur'an (Q 2:190-191).

Sampai di sini telah dengan panjang lebar dipaparkan pendirian dan penilaian terhadap modernisasi, berdasarkan Islam. Sebab, seperti telah dikemukakan dari semula, sebagai seorang Muslim, dan karena itu — sebagaimana halnya kaum Muslimin seluruhnya — meyakini kebenaran Islam keseluruhannya, sebagai *total way of life*. Itu dapat dipastikan, bahwa ada pihak-pihak yang berkeberatan terhadap sikap itu. Umpamanya, dapat dikatakan bahwa pandangan itu terlalu Islam-sentris, atau agama-sentris. Jadi kurang praktis, kurang pragmatis, atau kurang programatis.

Kami termasuk orang yang meyakini kebenaran hak untuk berbeda (*the right to dissent*), guna mendorong kompetisi menuju kebaikan (*fastabiq-ū 'l-khayrāt*). Lagi-lagi pendirian ini juga didasarkan atas ajaran Tuhan Yang Mahaesa (Q 5:48). Tetapi hendaknya hak untuk berbeda itu tidak hanya dikenakan dalam masalah-masalah programatis saja, dengan alasan apa pun. Hak untuk berbeda terutama sekali ialah dalam masalah-masalah dasar, yaitu keyakinan. Hak untuk berbeda tidak hanya dalam segi-segi operatif (ini hanya ada di kalangan orang-orang yang sudah sama keyakinannya), tetapi lebih-lebih lagi dalam segi-segi normatif. Inilah sebabnya, Islam mengenal ajaran *la kum dīn-ukum wa liya dīn* (bagi kamu agamamu, dan bagiku agamaku atau keyakinanku), dan *lā ikrāh-a fi 'l-dīn* (tidak ada paksaan dalam hal agama atau keyakinan).

Suatu keyakinan (agama, ideologi, dan lain sebagainya) sepenuhnya diperlukan oleh seseorang atau masyarakat atau bangsa tidak mungkin mempunyai peradaban yang luhur. Menteri kese-

hatan, pendidikan, dan kesejahteraan Amerika Serikat, John W. Gardner, mengatakan bahwa di balik tiap-tiap peradaban besar, dan di balik semua kekuatan persenjataan yang lengkap, dan kemakmuran adalah sesuatu yang sangat kuat, tetapi juga tidak substansial, yaitu: sekumpulan gagasan, sikap dan keyakinan — dan kemantapan bahwa gagasan-gagasan dan keyakinan-keyakinan itu dapat hidup terus. Tidak ada suatu bangsa yang dapat mencapai kebesaran, kecuali jika bangsa itu meyakini sesuatu hal, dan kecuali jika sesuatu yang diyakini itu mempunyai dimensi-dimensi moral untuk menopang suatu peradaban besar. Kalau cahaya keyakinan sudah pudar, maka semua kemampuan produktif, semua kecakapan dan semua kekuatan bangsa, akan menjadi musnah, dan masa kegelapan akan terjadi. Di Guatemala dan Meksiko Selatan, umpamanya, seseorang dapat menyaksikan orang-orang Indian yang, tidak meragukan lagi, merupakan keturunan langsung mereka yang dahulu menciptakan peradaban Maya. Sekarang ini mereka adalah orang-orang yang sederhana, tidak mempunyai perhatian tentang diri mereka sendiri, ataupun tentang dunia luar, dan memang tidak banyak mengetahui. Suatu cahaya telah hilang. Sesungguhnya keadaan lingkungan (geografi) dan sumber-sumber alam tidak mengalami perubahan apa-apa; demikian juga, bentuk genetik bangsa itu tetap sama. Mereka pernah menjadi bangsa yang besar. Sekarang ini mereka malahan tidak ingat lagi kebesaran nenek moyang mereka. Apakah yang terjadi? Saya kira, dalam hal orang-orang Maya ini, gagasan-gagasan (keyakinan-keyakinan) yang berkuasa adalah terlalu primitif untuk dapat menopang suatu peradaban besar dalam jangka waktu yang lama.

Sekarang, keyakinan kita ialah Islam. Sebagaimana diterangkan di muka, tentu ada pihak-pihak yang berkeberatan atas hal ini. Akan tetapi, tidak seorang pun berhak menghalanginya. Sebab, sikap itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita, sebagai suatu manifestasi kebebasan beragama (dan bukan kebebasan untuk tidak beragama). Malahan, hal itu merupakan pelaksanaan dasar negara Pancasila. Sikap mengembalikan segala permasalahan kepada ajaran

Tuhan Yang Mahaesa adalah sikap yang konsekuen kepada nilai-nilai Pancasila. Kalau tidak demikian, maka akan dikemanakan sila pertama Pancasila itu?

Benar sekali pendapat Pak Hatta, salah seorang penandatangan Piagam Jakarta, yang di dalamnya, untuk pertama kalinya secara resmi, nilai-nilai yang kelak disebut Pancasila itu dirumuskan, bahwa sila Ketuhanan Yang Mahaesa adalah sila primer dan utama yang menyinari dan menjadi sumber dalam kehidupan manusia ini. Dan benarlah perumpamaan yang diberikan oleh Buya Prof. Dr. Hamka, tentang Pancasila sebagai suatu bilangan 10.000 (sepuluh ribu), di mana angka 1 (satu) merupakan perumpamaan sila pertama (Ketuhanan Yang Mahaesa), dan empat angka nol berikutnya merupakan perumpamaan empat sila selanjutnya. Sekarang hilangkan angka 1 (satu) itu, maka yang akan terjadi ialah deretan empat angka nol semata. Dan betapapun panjangnya deretan angka nol itu, nilainya akan tetap nol juga. Demikianlah Buya Hamka.

Pendeknya, Ketuhanan Yang Mahaesa itulah secara mutlak memberi arti bagi Pancasila dan sila apa pun dalam kehidupan manusia. Sebab, seperti dikatakan oleh Gardner di atas, Ketuhanan Yang Mahaesa itulah yang mendasari dimensi-dimensi moral yang akan menopang setiap peradaban manusia. Dan Ketuhanan Yang Mahaesa, atau tauhid, itulah yang menjadi sentral dan intisari agama-agama yang dibawa oleh para Nabi, semenjak Nabi pertama sampai Nabi terakhir (Muhammad *saw*). Demikianlah dikatakan dalam Q 21:25.

Jika tidak demikian sikap kita, maka kita menjadi sekular. Sekularisme ialah suatu paham yang dimulai dengan formula: “Berikan kepada kaisar apa yang menjadi kepunyaan kaisar (urusan duniawi) dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi kepunyaan Tuhan (urusan ukhrawi)”. Dengan perkataan lain, sekularisme adalah suatu paham yang mengatakan bahwa Tuhan tidak berhak mengurus masalah-masalah duniawi. Masalah-masalah duniawi harus diurus dengan cara-cara lain, yang tidak

datang dari Tuhan. Jadi, sekularisme adalah paham tidak bertuhan dalam kehidupan duniawi manusia. Maka seorang sekular yang konsekuen dan sempurna, akan mengalami kepribadian yang pecah (*splite personality*). Di satu pihak mungkin dia tetap memercayai adanya Tuhan, malahan menganut suatu agama, di lain pihak tidak mengakui kedaulatan Tuhan dalam masalah-masalah kehidupan duniawinya, melainkan hanya mengakui adanya kedaulatan penuh manusia. Tegasnya, dalam masalah duniawi, seorang sekular pada hakekatnya tidak lagi bertuhan, jadi ia adalah ateis. Maka jika agama, khususnya Islam menaruh keberatan prinsipil terhadap komunisme, terutama karena ateisnya itu. Sebab, ateisme menjurus ke imperarialisme. Karena, sebagaimana dalam teori dan praktik, orang yang memulai sesuatu dengan mengingkari adanya keutamaan Zat Yang Mahatinggi (Tuhan), maka akhirnya ia akan mengingkari nilai-nilai. Kaum komunis (di Soviet ataupun Cina, umpamanya) dapat saja membangun peradaban yang tinggi dan mengagumkan, seperti telah terjadi kenyataan sekarang ini. Tetapi dapat dipastikan, bahwa peradaban itu akan runtuh binasa karena lapuknya landasan moral yang menopangnya, cepat ataupun lambat. Nasibnya akan sama dengan peradaban Maya dari bangsa Indian, seperti yang dipaparkan di muka.

Akan tetapi, hal itu tidaklah khusus bagi kaum komunis saja, melainkan bagi setiap kelompok manusia yang menganut sikap sekular, tidak bertuhan dalam kehidupan duniawinya, malahan bagi siapa saja yang mengingkari nilai moral yang bersumber kepada Ketuhanan Yang Mahaesa, sekalipun mungkin secara formal dia menganut dan mengamalkan agama. Pengertian terakhir itu, umpamanya, terbukti dalam sejarah umat Islam pada abad ke-13. Karena kaum Muslimin tidak lagi mengindahkan ajaran-ajaran agamanya (Islam), peradaban mereka hancur-lebur di bawah telapak kaki tentara kafir bangsa Mongol yang datang menyerbu dari sebelah Timur.

Kaum sekular yang kurang konsekuen (tidak sepenuhnya menjadi ateis), karena keadaan kepribadiannya yang pecah itu, akan

mengajak kita untuk menganut paham bahwa kehidupan keagamaan adalah kehidupan perseorangan (*prive*), yaitu bahwa kehidupan keagamaan hanya berfungsi untuk menghubungkan diri seseorang manusia dengan Tuhannya (ibadat dalam pengertian sempit), sedangkan untuk masalah-masalah duniawi mereka mengajak kita untuk memecahkan dan menyelesaikannya dengan cara-cara dan atas landasan-landasan yang lain. Bagi agama lain selain Islam, mungkin hal itu dapat saja terjadi. Tetapi bagi Islam, pemisahan masalah akhirat dari masalah duniawi, masalah perseorangan dari masalah sosial, adalah suatu hal yang tidak mungkin. Dengan meminjam istilah yang datang dari pihak kaum sekular sendiri, Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik. Untuk orang bukan Islam, atau orang Islam nominal (statistik), pengertian itu pasti sukar sekali diterima. Sebab, sebagaimana dikatakan oleh ulama-ulama Islam, Islam adalah sekaligus akidah (kepercayaan), syariat (ajaran hidup), dan *nizhām* (sistem). Sebagaimana dikatakan oleh V.N. Dean, Islam adalah integrasi-mutlak agama, sistem politik, cara hidup, dan interpretasi sejarah.¹

Harry J. Benda mengatakan, dalam bukunya, *The Crescent and the Rising Sun*: “Pemisahan agama dan politik dalam Islam, setidaknya tidaknya dikatakan tidak realistis”. Selanjutnya dia mengatakan: “Pemisahan agama dan politik, dengan perkataan lain, adalah sekadar merupakan gejala-sementara Islam yang sedang mengalami kemunduran. Dalam masa kebangkitan Islam, pemisahan agama dan politik tidak dapat bertahan lagi, baik di negara-negara Islam yang merdeka maupun di daerah-daerah Islam yang diperintah oleh orang-orang bukan Islam”.

Pendeknya, siapa saja mempelajari Islam dengan cukup mendalam, akan mendapatkan bahwa Islam tidak mengenal masalah duniawi yang terpisah dari masalah ukhrawi. Setiap kegiatan seorang Muslim, dari yang besar, seperti yang menyangkut masalah kenegaraan, sampai yang sekecil-kecilnya, seperti langkah-kaki

¹ V.N. Dean, *The Nature of the non-Western World*

keluar-masuk rumah, tidak pernah terlepas dari pengawasan Tuhan dengan ajaran-Nya, yaitu Islam.

Jadi, kaum sekularisme menolak pemakaian prinsip ketuhanan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah-masalah duniawi manusia. Hal ini bertentangan dengan kesemestaan Islam. Sekarang timbul pertanyaan: Atas dasar apakah kaum sekularisme menyelesaikan masalah-masalah duniawi mereka? Sungguh, jawaban atas pertanyaan itu sangat kompleks. Di sinilah kita bertemu dengan suatu prinsip dasar sekularisme: kepercayaan yang mutlak akan kemampuan manusia untuk menyelesaikan masalah kehidupan duniawinya. Kemampuan manusia yang diandalkan itu ialah rasionya. Kaum sekularis menuntut, dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan ini hendaknya manusia mengarahkan segala kemampuan rasionya, dan hanya rasionya saja. Karena itu, kaum sekularis mengakui kemutlakan rasio sebagai alat untuk menemukan kebenaran terakhir (*ultimate truth*). Islam memerintahkan rasionalitas, tetapi tidak rasionalisme. Islam menuntut agar setiap orang itu rasional, tetapi tidak rasionalis. Sekarang marilah kita telaah perbedaan antara keduanya itu.

Rasionalisme dan Agama Baru (Humanisme)

Rasionalisme adalah suatu paham yang mengakui kemutlakan rasio, sebagaimana yang dianut oleh kaum komunis. Maka, seorang rasionalis adalah seorang yang menggunakan akal pikirannya secara sebaik-baiknya, ditambah dengan keyakinan bahwa akal pikirannya itu sanggup menemukan kebenaran, sampai yang merupakan kebenaran terakhir sekalipun. Sedangkan Islam hanya membenarkan rasionalitas, yaitu dibenarkannya menggunakan akal pikiran oleh manusia dalam menemukan kebenaran-kebenaran. Akan tetapi, kebenaran-kebenaran yang ditemukannya itu adalah kebenaran insani, dan karena itu terkena sifat relatifnya manusia. maka menurut Islam sekalipun rasio dapat menemukan kebenaran-

kebenaran, namun kebenaran-kebenaran yang relatif, sedangkan kebenaran yang mutlak hanya dapat diketahui oleh manusia melalui sesuatu yang lain yang lebih tinggi daripada rasio, yaitu wahyu (*revelation*) yang melahirkan agama-agama Tuhan, melalui Nabi-nabi.

Keterbatasan kemampuan rasio, dan keharusan manusia untuk menerima sesuatu yang lebih tinggi daripada rasio dalam rangka mencari kebenaran, kiranya memerlukan sedikit pembahasan yang lebih luas. Ditinjau dari segi ajaran Islam, maka Allah, dalam al-Qur'an, berfirman: "*Tidaklah kamu (manusia) diberi ilmu pengetahuan (melalui rasio) melainkan sedikit saja,*" (Q 17:85). Dan menurut ilmu pengetahuan modern, baiklah kita kemukakan di sini pengakuan Einstein yang mengatakan: "Kesadaran bahwa seluruh pengetahuan kita tentang alam raya hanyalah semata-mata residu daripada kesan-kesan yang diselubungi oleh akal pikiran kita yang tidak sempurna, membuat mencari kenyataan itu (kebenaran) tampaknya tidak bisa diharapkan."² Agaknya, karena kesadaran akan keterbatasan akal pikiran inilah, Einstein memasuki alam keinsyafan keagamaan yang mendalam.

Sebenarnya setiap manusia, untuk hidupnya yang bahagia, harus melalui empat tahap berturut-turut. *Pertama*, ialah tahap naluriah, dengannya seorang manusia yang baru lahir ke dunia, hidup. *Kedua*, ialah tahap *panca indera* atau indera umumnya, yang akan menyempurnakan bekerjanya naluri, malahan memang bekerja atas dasar bekerjanya naluri pula. Tetapi, indera pun belum cukup, sebab indera masih terlalu banyak membuat kesalahan. Maka dilengkapilah dengan tahap *ketiga*, yaitu akal pikiran, yang memberikan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh indera, dan bekerja atas dasar bekerjanya indera pula. Dan sekarang, akal pikiran atau rasio ini pun mempunyai kemampuan yang terbatas, seperti diakui oleh Einstein, seorang ilmuwan (rasional) terbesar abad sekarang. Padahal, demi kebahagiaan sejati manusia,

² Linncoln Bernett, *The Universe and Dr. Einstein*.

harus sampai kepada kebenaran terakhir. Oleh karena itu, Tuhan pun memberikan pengajaran kepada manusia tentang kebenaran terakhir (*ultimate truth*) itu melalui Nabi-nabi dan Rasul-rasul yang dipilih di antara manusia. Pengajaran Tuhan itu dinamakan wahyu (*revelation*). Wahyu pengabisan Tuhan ialah al-Qur'an, Kitab Suci agama Islam. Maka Islam mengklaim dirinya sebagai kebenaran terakhir itu, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an.

Keempat tahap jalan hidup manusia itu adalah seperti jenjang anak tangga: naluri, indera, rasio, dan wahyu (agama). Sekalipun menunjukkan urutan yang semakin tinggi nilainya, namun tidak boleh ada yang bertentangan dengan akal (rasio), sekalipun lebih tinggi daripada rasio.

Modernisasi, yang berarti rasionalisasi, pusat pembicaraan kita ini, tentunya dikenakan dalam aspek kehidupan kita seluas mungkin. Pada permulaan pembahasan telah dikemukakan bidang berpikir dan tata kerjanya. Bidangannya bersifat konkret-material, seperti sistem pertanian, perhubungan, proses produksi di pabrik-pabrik dan lain-lain; dan yang bersifat tidak material adalah seperti perbaikan sosial ekonomi dan politik.

Maka di sinilah kita bertemu lagi dengan masalah yang cukup rumit. Dalam masalah-masalah yang bersifat konkret lagi material, manusia mungkin dapat mengadakan penelaahan, kemudian menarik hukum-hukum umumnya (membuat generalisasi), dengan sikap yang obyektif. Misal, dalam hal pelistrikan. Dalam hal listrik ini, manusia dapat bersikap seobyektif mungkin dalam penelaahan, penyelidikan, dan akhirnya penyimpulan hukum-hukumnya, sehingga memungkinkan ditemukannya teori (ilmu) yang benar tentang listrik. Dan begitulah kenyataannya, manusia, di mana saja ia berada, di Amerika ataupun di Rusia, di Afrika ataupun di Asia, menganut hukum-hukum dan teori-teori yang sama tentang benda tersebut (listrik), dan karenanya, menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut benda itu dengan cara dan teknik yang sama pula.

Tetapi bagaimanakah sikap manusia yang menyangkut dirinya sendiri: yaitu dalam masalah-masalah pergaulan sesama manusia (sosial, malahan juga tentang kehidupan dirinya sendiri [individual])? Dalam hal ini, manusia tidak mungkin melepaskan diri dari subyektivitasnya dan anggapan-anggapan yang telah dipunyai dan memenuhi pikirannya. Ketika manusia mengadakan pengamatan terhadap masalah-masalah kemanusiaan, menyelidiki hukum-hukum yang menguasai hubungan sesama manusia, dia tidak lagi sanggup bertindak seobyektif mungkin. Hal itu mengakibatkan hukum-hukum yang disimpulkan oleh manusia tentang manusia sendiri, yang mengenai masalah-masalah kehidupannya sebagai makhluk sosial, tidak bisa lepas dan bersih dari anggapan-anggapan yang telah dipunyai sebelumnya. Akibatnya, ilmu yang ditariknya menjadi tidak benar, bersifat subyektif. Inilah yang menyebabkan berbeda-bedanya paham manusia tentang sistem-sistem sosial, ekonomi, dan politik, yang mengatur perikehidupan manusia sebagai makhluk sosial, dari tempat ke tempat. Pada masa sekarang ini saja, semua orang sudah tahu pertentangan diamental antarkelompok manusia yang menganut sistem komunisme-totaliterisme. Manakah dari keduanya itu yang benar?

Islam memberi jawaban yang tegas, bahwa tidak satu pun dari kedua sistem itu yang benar. Sebab, jika dalam hal benda-benda material saja rasio manusia tidak sanggup menemukan kenyataan (realitas) terakhir yang merupakan *ultimate truth*, sebagaimana diakui Einstein, maka apalagi tentang hal yang bukan material, seperti masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik. Apalagi, dalam hal yang kedua ini, manusia tidak sanggup bersikap obyektif. Oleh karena itu, sekali lagi, manusia memerlukan pengajaran dari Tuhan, Pencipta manusia, Pengatur atau Pemberi Hukum (*The Law Giver*) bagi kehidupannya, baik yang bersifat individual maupun komunal, sebagaimana Tuhan itu pula adalah Pencipta seluruh alam, Pengatur atau Pemberi hukum kepadanya (*Rabb al-‘ālamīn*). Jadi, manusia harus kembali kepada ajaran Tuhan, terutama dalam usahanya untuk menemukan dan mencari masalah-masalah normatif yang bersifat

asasi. Sedangkan dalam masalah-masalah operatif, manusia masih diberikan kelonggaran seluas-luasnya untuk menemukan sendiri, dengan mengerahkan segenap kemampuan akal pikirannya.

Dengan perkataan lain, secara singkat, dalam kegiatannya yang meliputi bidang apa pun dari kehidupannya, manusia harus mencari dasarnya di dalam prinsip Ketuhanan Yang Mahaesa. Kembali ke sekularisme. Masih ada sesuatu yang harus diterangkan sedikit. Oleh karena kaum sekularis tidak mau menjadikan agama (baca: ajaran Tuhan Yang Mahaesa) sebagai sumber norma-norma asasi dalam kehidupan duniawinya, maka sesuai dengan ketentuan bahwa manusia harus mempunyai sekumpulan leyakinan untuk menopang peradaban yang hendak diciptakannya, kaum sekularis pun kemudian menciptakan pula sekumpulan gagasan, sikap, dan kepercayaan, yang nantinya menjelma menjadi suatu kesatuan keyakinan yang menyerupai agama. Mengingat bahwa kaum sekularis pada pokoknya menyandarkan diri kepada kemampuan diri-manusia sebagai sumber bagi penemuan nilai-nilai yang mutlak diperlukan dalam membina kehidupan, maka perkataan yang paling meliputi dan umum dipakai untuk menamakan sekumpulan gagasan, sikap, dan kepercayaan itu ialah perkataan humanisme.

Dalam hubungannya dengan masalah ini, Julian Huxley, seorang humanis terkenal, tegas-tegas mengatakan, bahwa humanisme adalah sebuah agama baru. Karena dia memercayai akan adanya evolusi kemanusiaan dalam menemukan nilai-nilai kebenaran (sampai kebenaran terakhir), maka ia menamakannya humanisme evolusioner (*evolutionary humanism*). Tentang humanisme ini, dia menulis sebuah buku dengan judul *Religion without Revelation* (Agama tanpa Wahyu). Dan dalam bukunya, *Evolution in Action*, dia mengatakan sebagai berikut:

Saya terpaksa menggunakan perkataan agama. Sebab, kenyataan bahwa semua ini membentuk sesuatu dalam hakikat agama, barangkali orang dapat menamakannya humanisme evolusioner. Perkataan “agama”, sering dipakai secara terbatas, dengan arti ke-

percayaan kepada dewa-dewa; tetapi saya tidak memakainya dalam pengertian ini — dengan sendirinya saya tidak ingin melihat seorang manusia diangkat menjadi dewa, sebagaimana terjadi dengan beberapa orang di masa silam, dan masih terjadi sampai hari ini. Saya menggunakannya dalam pengertian yang lebih luas, untuk menunjukkan suatu hubungan menyeluruh antara seseorang dengan nasibnya, dan sesuatu yang menyangkut perasaannya tentang apa yang suci. Dalam pengertian yang luas ini, humanisme evolusioner, bagi saya, tampaknya dapat dijadikan benih suatu agama baru, yang tidak usah menyingkirkan agama-agama yang ada dengan menggantikan agama-agama itu. Sekarang tinggallah mencari jalan, bagaimana agar supaya benih ini dapat berkembang — untuk mengerjakan kerangka intelektualnya, bagaimana caranya supaya gagasan-gagasan itu dapat memberikan inspirasi, dan untuk meyakinkan penyebarannya yang luas.³

Jadi jelas, bahwa humanisme adalah sebuah agama baru hasil ciptaan manusia. Tidak seperti agama-agama lain, ia tidak berbicara tentang Tuhan. Tetapi, seperti agama-agama lain, ia membicarakan sesuatu yang sangat prinsipal, yaitu penentuan nasib manusia, dan penertian tentang sesuatu yang bersifat suci. Dan mereka percaya bahwa humanisme berlaku di mana saja dan kapan saja: universal, malahan abadi.

Sebenarnya, tokoh-tokoh humanisme meliputi suatu strata sempit masyarakat Barat, yang terdiri kaum cerdik pandai (intelektual). Dan kesemuanya berlomba-lomba menulis buku yang bersangkutan dengan agama baru itu. Untuk menyebutkan sebagian saja, kami kemukakan di sini sebagaimana yang diterangkan oleh A.J. Bahm: Charles Francis Potter menulis buku, *Humanism ia a New Religion*, Roy Wood Sellar menulis buku *Religion Coming of Age*, Durant Drake menulis buku, *The Law Morality*, Corliss Lamont dengan bukunya, *Humanism as a Philosophy*, dan lain-lain.

³ Julian Huxley, *Evolution in Action*.

Oleh karena sekularisme merupakan keharusan bagi humanisme, maka Horrace menulis buku, *Secularism ia the Will of God*. Dan pragmatisme pun merupakan unsur penting *way of life*, menurut humanisme. Maka di sini pun perlu disebutkan buku William James, *Pragmatism, A New Name for Some Old Ways of Thinking*.

Pada tahun 1933, kaum humanis mengeluarkan sebuah manifesto yang dinamakan “*A Humanist Manifesto*”, dikeluarkan di Chicago, dan ditandatangani oleh tiga puluh empat penandatangan. Mukadimah manifesto itu menyebutkan: “Agama selalu merupakan jalan untuk melaksanakan nilai-nilai tertinggi kehidupan”. Tetapi, ada suatu bahaya yang besar untuk mengidentikkan perkataan agama dengan doktrin-doktrin dan metode-metode yang telah kehilangan artinya dan kehilangan kekuatan untuk dapat menyelesaikan masalah kehidupan manusia di abad kedua puluh, dan seterusnya.

Kaum humanis juga lupa membentuk sebuah organisasi internasionalnya. Maka dibentuklah di Amsterdam pada tahun 1952 “*The Internasional Humanist and Ethical Union*”, dan telah mengadakan kongresnya yang ketiga pada tahun 1962 di Oslo. Organisasi internasional itu meliputi organisasi-organisasi nasional kaum humanis di hampir seluruh negara di dunia, dan juga perseorangan-perseorangan. Mereka juga menerbitkan majalah *International Humanism*.

Perumusan dasar (*basic postulate*) kepercayaan, atau “iman”, humanisme ialah “*the universe is self-existing*” (alam raya ada dengan sendirinya), seperti juga pendapat kaum materialis. Selanjutnya, seperti telah banyak disinggung di muka, nilai-nilai kehidupan tidak perlu dicari dari sesuatu yang bersifat adialami (Tuhan), melainkan dari dalam diri manusia sendiri. Maka di manakah perbedaannya dengan ateisme?

Akhirnya, ditinjau dari perkembangan sejarahnya, humanisme tidak lain ialah usaha manusia-manusia Barat untuk menemukan nilai-nilai hidup baru, setelah agama-agama yang dikenal di sana tidak dapat mempertahankan diri lagi di hadapan perkembangan

ilmu pengetahuan dan kecerdasan otak manusia. Dan sekarang ini, humanisme, seperti dikatakan oleh Archio J. Bahm, merupakan agama yang umum bagi peradaban Barat (Westernisme).

Westernisme, Liberalisme, dan Komunisme

Kita sepenuhnya berpendapat bahwa modernisasi ialah rasionalisasi yang ditopang oleh dimensi-dimensi moral, dengan berpijak pada prinsip iman kepada Tuhan Yang Mahaesa. Akan tetapi, kita juga akan sepenuhnya menolak pengertian yang mengatakan bahwa modernisasi ialah westernisasi, sebab kita menolak westernisme. Dan westernisme yang kita maksudkan itu ialah suatu keseluruhan paham yang membentuk suatu *total way of life*, di mana faktor yang paling menonjol ialah sekularisme, dengan segala percabangannya, sebagaimana telah diterangkan di atas.

Maka sangat kekanak-kanakan jika perkataan westernisasi itu hanya menimbulkan kesan tentang film-film cabul, lagu-lagu yang jingkrak-jingkrak, pakaian-pakaian atau mode-mode yang ingin sebanyak mungkin memperlihatkan bagian tubuh si pemakai, dan seterusnya, di mana hal-hal di atas itu merupakan gejala-gejala kemerosotan moral Barat. Kesemuanya itu memang termasuk yang kita tolak. Akan tetapi kita ingin mengemukakan, bahwa justru sumber kesemuanya itulah yang secara prinsipal kita tentang habis-habisan. Dan ateisme adalah puncak sekularisme. Sekularisme itulah sumber segala imoralitas.

Dan sudah pasti, kita tidak menolak ilmu pengetahuan yang benar, dan juga teknologi, sekalipun berasal dari Barat, bahkan sekalipun berasal dari komunis. Sebab ilmu pengetahuan dan teknologi sama sekali tidak dapat dikatakan dimonopoli oleh Barat, apalagi disebut sebagai westernisme. Malahan dalam hal ilmu pengetahuan, Nabi Muhammad memerintahkan umatnya untuk mencarinya di mana saja, “meskipun ke negeri Cina”.

Malahan sudah menjadi pengakuan yang umum sekali sekarang ini, bahwa kemajuan Barat adalah berkat ilmu pengetahuan kaum Muslimin di zaman-zaman keemasannya. Supremasi Islam di muka bumi, dua kali lebih panjang lamanya daripada supremasi Barat sekarang ini. Dan umat Islam, di mana saja, diliputi oleh optimisme yang meluap-luap bahwa supremasi itu akan kembali ke tangannya cepat atau lambat. Bukankah Tuhan telah berfirman:

“Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya (Muhammad) dengan membawa petunjuk dan agama kebenaran untuk menegakkannya mengatasi seluruh agama yang lain, dan cukuplah Tuhan sebagai saksi,” (Q 48:28).

Cabang-cabang sekularisme antara lain, ialah liberalisme. Bila diukur dengan ajaran Tuhan Yang Mahaesa, liberalisme adalah suatu ajaran sesat yang harus ditentang. Mengenai ajaran liberalisme tentang kemerdekaan individu, tentu patut dihargai. Tetapi bahwa kemerdekaan itu tak terbatas, adalah suatu hal yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat. Tuhan mengajarkan kemerdekaan individu, tetapi mengajarkan bahwa kemerdekaan tiap-tiap individu dibatasi oleh kemerdekaan individu lainnya (*hurriyat al-mar’i mahdūdat-un bi-hurriyat siwāh*). Oleh karena itu, ada perintah Ilahi tentang amar makruf nahi munkar, serta ada larangan bagi seorang anggota masyarakat untuk bermasabodoh terhadap kejahatan yang dilakukan orang lain, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, karena akibat buruk kejahatan itu akan menimpa juga orang yang baik- baik (Q 8:25). Jadi, di antara kemerdekaan individu dan tanggung jawab sosial terdapat jalinan yang erat, kesalingbergantungan. Kebahagiaan manusia tidak hanya terletak pada tanggung jawab pribadinya (amal baik dan buruk, kelak, di akhirat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, mutlak secara individual), tetapi juga terletak pada adanya pengakuan akan hak orang lain untuk berbuat sesuatu amal bagi dirinya, dan bersama-sama dengan anggota masyarakat lain, di atas

dasar persamaan hak, bergotong-royong membangun masyarakat yang bahagia dan bertakwa (*ta'āwanū 'alā al-birr wa al-taqwā*).

Liberalisme mengakibatkan individualisme, dan individualisme mengakibatkan kapitalisme. Maka dalam kapitalisme inilah kita dapati prinsip kemerdekaan dinodai sedemikian rupa, sehingga tinggal sebagai semboyan belaka. Orang-orang kapitalis berbicara tentang “kemerdekaan ekonomi”: kebebasan setiap orang untuk mengumpulkan harta kekayaan dan menggunakannya sebagai modal, tanpa menentukan norma moral bagaimana harta kekayaan itu diperoleh. Bagi mereka tidak ada harta yang halal maupun yang haram. Akibatnya ialah terjadi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, suatu kepincangan sosial yang sangat destruktif. Maka bagi kita, kemerdekaan tidak boleh lepas dari persamaan. Dan pelaksanaan persamaan itu harus dengan pengorbanan sebagian kemerdekaan seseorang.

Komunisme adalah bentuk lain dan lebih tinggi dari sekularisme. Sebab, komunisme adalah sekularisme yang paling murni dan konsekuen. Dalam komunismelah seseorang menjadi ateis sempurna. Kaum komunis membenarkan, malah mendasarkan keseluruhan ajarannya pada prinsip persamaan di antara manusia. Tetapi prinsip persamaan dalam komunisme itu pun mengalami nasib yang sama dengan prinsip kemerdekaan dalam kapitalisme. Kaum komunis menodai prinsip persamaan itu sebegitu rupa, sehingga tinggal semboyan semata-mata. Malahan yang terjadi ialah adanya supremasi-mutlak pihak penguasa atas pihak yang dikuasai, yaitu rakyat pada umumnya. Diktator proletar, pada hakikatnya, ialah diktator para pemimpin-pemimpin dan penguasa-penguasa.

Karena kapitalisme dan komunisme itu tidak benar, maka kita sekarang menyaksikan pergeseran-pergeseran di dalam keduanya. Sebab, manusia tidak mungkin bisa bertahan sepenuhnya dalam suatu prinsip dan dalam ajaran yang kebenarannya tidak mutlak. Sekarang ini kita melihat, bahwa negara-negara kapitalis makin menunjukkan gejala-gejala sosialis. Sebaliknya, negara-negara

komunis, dari hari ke hari, semakin menjadi liberalistis. Di manakah mereka kelak akan bertemu? Masih sukar untuk meramalkannya. Tetapi yang dapat dipersiapkan ialah bahwa suatu negara yang kapitalis, seperti Amerika Serikat, dalam waktu yang cukup lama tidak mungkin sepenuhnya meninggalkan kapitalisme dan menjadi komunis, dan sebaliknya, negara-negara komunis juga tidak mungkin, dalam waktu yang lama pula, menjadi negara-negara kapitalis. Dan sebenarnya, tidak-benarnya kapitalisme dan komunisme berakar pada tidak-benarnya sekularisme yang menjadi pangkal tolaknya.

Snouckisme:

Pengalaman Berharga bagi Bangsa Indonesia

Seorang Muslim, sebagai golongan manusia yang menerima kebenaran Ilahi, berkewajiban menyeru umat manusia untuk kembali kepada Tuhan, Pencipta mereka, dengan melaksanakan ajaran-ajaran-Nya. Dan itulah jalan yang lurus.

Tidak kurang pentingnya untuk diterangkan ialah sebab-sebab mengapa kita dari sekarang menyatakan penentangan kita terhadap westernisasi itu. Mengapa kita mempunyai kekhawatiran itu? Apakah memang ada usaha-usaha ke arah penyelewengan modernisasi menjadi westernisasi?

Sikap kita ini semata-mata didasarkan pada pengalaman-pengalaman di masa silam. Segera setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Partai Komunis Indonesia menunjukkan peranan yang semakin menentukan dalam pembentukan corak politik Indonesia, dan banyak dilontarkan kekhawatiran bahwa Demokrasi Terpimpinnya Soekarno akan diselewangkan menjadi pengabdian kepada kepentingan PKI dan aspirasi-aspirasinya. Pada waktu itu, pernyataan kekhawatiran itu selalu disambut dengan tuduhan hendak menentang kepemimpinan Bung Karno, Kontra Revolusi, dan seterusnya. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa kekhawatiran

itu akhirnya benar-benar terjadi, dengan peristiwa Lubang Buaya sebagai klimaksnya.

Memang gagasan-gagasan selalu dapat dibuat dengan perumusan-perumusan yang baik dan menarik rakyat. Tetapi di balik gagasan yang bagus itu terdapat sesuatu yang lebih menentukan, yaitu pelaksanaannya. Kita sudah terlalu sering mendengar bahwa “*the man behind the gun*” lebih penting dan menentukan daripada “*the gun*” itu sendiri. Ketika menerangkan tentang demokrasi yang berarti pemerintahan oleh rakyat, dan karena itu harus menghasilkan suatu pemerintahan yang respresentatif, John Strachey mengatakan bahwa diperlukannya pemerintahan yang representatif itu ialah karena rakyat memerlukan kebebasan untuk *hire and fire* pemerintahan tersebut, sesuai dengan kepentingannya. Pemerintah dapat saja diserahkan kepada kelompok ahli tanpa dukungan rakyat, sebagaimana banyak menjadi tuntutan sementara golongan. Tetapi pengalaman umat manusia di sepanjang sejarah menunjukkan, bahwa suatu pemerintahan oleh seseorang atau golongan akan beralih menjadi pemerintahan menurut kepentingan orang atau golongan tersebut.

Apa yang dikatakan oleh tokoh demokrat Inggris itu dibenarkan oleh persaksian kita di zaman kekuasaan Soekarno. Siapakah yang menyangkal kebakkan kembali kepada UUD 45, Sosialisme Indonesia, Demokrat Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Nasional? Kesemuanya itu adalah nilai-nilai yang tinggi. Malahan, siapa pula yang hendak mengingkari nilai masing-masing sila dari Pancasila, yang dengan sekuat tenaga hendak diklaim oleh Soekarno sebagai hasil penggaliannya? Tidak seorang pun dapat melakukan klaim tersebut. Malahan, di antara sekian banyak *mass appeal* Orde Baru sekarang ini ialah UUD 45 dan Pancasila, meskipun harus ditambah dengan “melaksanakan secara murni dan konsekuen”. Tetapi semua orang sepakat bahwa Sukarno dulu menggunakan slogan itu semuanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan golongannya.

Tanpa mengandalkan sikap *a priori* bahwa sekarang ini akan menjadi pula keadaan seperti permulaan Orde Lama, rakyat harus bersedia payung sebelum hujan, karena rakyat tidak bersedia kehilangan tongkat untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, kekhawatiran bahwa isu-isu pokok sekarang ini, selama rakyat tidak terikutsertakan, akan diselewengkan menjadi sesuatu yang bertentangan dengan aspirasi rakyat, mutlak harus dinyatakan. Sebab, seperti diakui oleh Pak Harto sendiri bahwa situasi tanah air sekarang ini — termasuk juga situasi pemerintahannya — adalah tidak wajar, karena masih berada dalam masa transisi. Salah satu ketidakwajaran itu ialah bahwa pemerintahan sekarang ini belum merupakan pemerintahan yang representatif. Dan yang kita maksudkan dengan pemerintahan di sini tidak hanya dalam bentuk formal saja, tetapi juga bentuk-bentuk informalnya yang cukup efektif pula; jadi, baik yang merupakan *the visible government* maupun yang merupakan *the invisible government*. Pendeknya, semua orang yang memegang peranan dalam menentukan politik negara ini, terutama kelompok yang menamakan dirinya sebagai “golongan intelektual”, sebab bukan rahasia lagi bahwa merekalah kini sumber-sumber konsepsi.

Nah, siapakah “golongan intelektual” itu. Hal ini memaksa kita untuk kembali sejenak ke sejarah masa lampau bangsa kita. Kita harus menoleh ke masa silam, untuk dapat menjadi lebih bijaksana di masa mendatang. Bukankah Tuhan berfirman: “*Sungguh, dalam sejarah orang-orang yang telah lalu itu, ada pelajaran bagi mereka yang rasional?*” (Q 12:111).

Untuk memulai pembahasan, orang-orang dari golongan “intelektual” ini kita sebut dengan peminjam istilah Gerald S. Maryanov dalam bukunya, *Politics in Indonesia: An Interpretation*, yaitu orang-orang intelek yang terbaratkan. Oleh karena itu mereka mempunyai seperangkat gagasan, sikap, dan keyakinan yang berkiblat ke kebudayaan Barat.

Hal itu tidaklah aneh kalau dilihat dari latar belakang pendidikan di mana mereka berasal. Dari segi pendidikan, mereka

adalah sisa-sisa strata sempit bangsa Indonesia yang tumbuh dalam alam pendidikan Belanda. Dan dari segi lingkungan sosial, mereka berasal dari sejumlah kecil bangsa Indonesia yang keluarga-keluarganya terlibat dalam pemerintahan kolonial Belanda. Kedua faktor itu — faktor pendidikan Belanda dan faktor kedudukan sebagai kelas elite di zaman kolonial — adalah dua faktor yang saling menyokong dan menguatkan. Seseorang tidak mungkin bisa memasuki sekolah-sekolah Belanda, kalau ia bukan berasal dari keluarga-keluarga “terhormat”, dan tidak mungkin bisa menikmati kedudukannya sebagai kelas atas, kalau tidak berpendidikan cukup, menurut ukuran Belanda.

Hal ini kita kemukakan tanpa sedikit pun mengurangi pengakuan bahwa di antara golongan yang termasuk “*the westernized intellectuals*” itu ada juga yang cukup patriotis dan besar sumbangannya bagi kemerdekaan tanah air. Tetapi sebagai keseluruhan, kelompok mereka adalah seperti yang kita paparkan di atas.

Seperti diketahui, Pemerintah Kolonial Belanda memberikan pendidikan kepada pribumi Hindia Belanda, dan mendirikan sekolah-sekolah, sejak dari sekolah rendah sampai sekolah tinggi. Hal-hal itu dilakukan dalam rangka “politik sopan” (*ethical policy*) -nya. Hal ini memaksa kita untuk kembali ke sejarah yang agak lebih jauh lagi.

Dalam menjalankan “politik sopan” inilah pandangan-pandangan seorang ahli Islam (Islamologi) terkenal, Snouck Hurgronje, sangat berpengaruh. Ketika menasehati Pemerintah Kolonial Belanda, untuk menghadapi umat Islam Indonesia, Snouck Hurgronje mengemukakan pendapatnya bahwa Pemerintah Kolonial harus mengembangkan sikap netral terhadap Islam sebagai agama, dan sikap keras-tegas terhadap Islam sebagai gerakan politik, dan Pemerintahan Kolonial sekaligus harus merangkul golongan-golongan dalam masyarakat Indonesia yang agak tipis keislamannya: yaitu kaum elite tradisional, pemimpin-pemimpin kaum adat di luar Jawa, dan kaum priyayi di Jawa. Kesemuanya itu ditempuh semata-mata untuk memperkukuh kolonialisme Belanda di bumi Indonesia.

Tetapi, hal itu semua hanyalah permulaan politik Belanda lebih lanjut: yaitu sepenuhnya menghancurkan Islam, dan oleh Dr. Harry J. Benda: "... selama bangsa Indonesia, terutama pemimpin-pemimpinnya, masih tetap merupakan orang-orang Muslim, maka hubungan kolonial selamanya tidak akan dapat memberikan jalan bagi adanya ikatan yang abadi antara Indonesia dan Negeri Belanda".⁴

Lebih dari itu — dan inilah intisari filsafat kolonialismenya Snouck Hurgronje — Indonesia harus dimodernisasikan, dijadikan modern. Dan seperti juga dikatakan oleh Snouck, "Oleh Indonesia modern itu, menurut batasannya, tidak mungkin merupakan Indonesia Islam, dan tidak pula merupakan Indonesia yang diperintah oleh adat (maksudnya: nasional, penulis), maka ia harus merupakan Indonesia yang dibaratkan".

Untuk mencapai itu semua, "Peradaban Belanda harus dapat menggeser peradaban priyayi tradisional, dan lebih-lebih lagi, peradaban santri". Demikianlah dikatakan oleh Harry J. Benda.

Selanjutnya, dia menerangkan bahwa penghancuran Islam di Indonesia, pembebasan pengikut-pengikutnya dari apa yang oleh Snouck Hurgronje disebut "*the narrow confines of Islamic system*" (suatu lingkungan yang sempit dari sistem Islam), harus dilakukan dengan mengikutsertakan orang-orang Indonesia dalam kebudayaan Belanda. Maka wajar, jika Snouck Hurgronje memusatkan perhatiannya kepada kaum bangsawan Jawa, dan kepada kaum elite priyayi umumnya, sebagai lapisan masyarakat yang pertama dan paling mudah untuk dimasukkan ke dalam orbit westernisasi. Tingkat lebih tinggi kaum aristokrat, dan pendekatannya kepada pengaruh-pengaruh Barat yang dibawa oleh adanya hubungan dengan kepegawaian (administrasi) menurut cara Eropa, dan lebih penting lagi, sifatnya yang agak jauh dari Islam, membuatnya sebagai pihak yang secara wajar menerima dan memanfaatkan rencana *assimilasionis*-nya Snouck. Kaum ningrat Indonesia, menurut

⁴ Harry J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun*, h. 25.

Snouck, kehilangan tambatan politik dan kebudayaan mereka, akibat penjajahan Belanda. Dia menegaskan: “Orang-orang Belanda mempunyai kewajiban moral untuk mengajar kaum ningrat, dan menjadikan mereka sebagai rekanan dalam kehidupan sosial dan budaya kita sendiri”. Kerekanan tersebut akan mengakhiri jurang pemisah antara pihak penguasa (penjajah) dan yang dikuasai (yang dijajah). Dengan tidak lagi terpisah oleh kesetiaan kepada agama, keduanya akan bersatu dalam persamaan kebudayaan dan kesetiaan politik. Sekalipun pada awalnya golongan *interest* ini hanya meliputi kaum elite Jawa, *toh* masyarakat Indonesia berakar dalam adat akan ternyata cukup dapat menyesuaikan diri untuk mengikuti jalan yang ditempuh oleh pemimpin-pemimpin tradisional mereka. Agar pengikutsertaan itu menjadi kenyataan, maka pendidikan Barat harus dibuat dapat dinikmati oleh seluas mungkin orang-orang Indonesia. Dalam analisisnya yang terakhir, Snouck Hurgronje mengatakan: “Pendidikan Barat adalah cara yang paling dapat dipercaya untuk mengurangi dan akhirnya mengalahkan pengaruh Islam di Indonesia”.

Tetapi, pendidikan hanyalah langkah pertama politik Belanda. Pendidikan harus diikuti dengan “... memberikan banyak saham, dalam menangani masalah-masalah jajahan, baik yang bersifat politik maupun administratif, kepada orang-orang Indonesia yang mendapatkan pendidikan Barat itu”.

Pendidikan Belanda tersebut adalah pendidikan kolonial, semata-mata untuk mengabdikan kepada kepentingan Pemerintah Kolonial. Jadi, pendidikan itu sama sekali tidak demokratis. Di situlah Belanda mengadakan westernisasi yang — seperti telah banyak diterangkan di muka — dimaksudkan untuk mengganti peradaban Islam Indonesia dan adat. Oleh sebab itu, pendidikan Belanda itu penuh dengan sinisme kepada Islam dan kepada Indonesia. Tidak seorang anak didik Belanda pun diberi kesempatan untuk mengembangkan kepribadiannya secara keislaman atau keindonesiaan. Sinisme kepada Islam, terutama, merupakan suatu sikap yang intensif ditanamkan. Akibatnya ialah

para anak didik tumbuh menjadi manusia-manusia yang kehilangan harga dirinya sebagai orang Islam dan sebagai bangsa Indonesia, kemudian sebagai kompensasinya, berusaha keras membelandakan diri. Meminjam istilah Dr. Rasjidi, mereka terkena penyakit "... kecongkakan karena keunggulan kultural". Dan yang dimaksudkan dengan kultur di sini ialah kultur Belanda khususnya dan Barat (Westernisme) umumnya.

Harus diakui bahwa dengan pendidikan itu Belanda telah meng-introdukir ilmu pengetahuan kepada bangsa Indonesia. Akan tetapi, di samping segi-segi positif, segi negatif, seperti diterangkan di muka, jauh lebih terasa. Oleh karena itu, tumbuhlah suatu lapisan kecil bangsa Indonesia yang cukup terpelajar (intelektual), tetapi tidak mempunyai kepribadian, kecuali kepribadian imitasi yang diambil dari Barat. Mereka kemudian terasing dari rakyat, dan membentuk masyarakat sendiri, dengan *way of life*-nya sendiri pula.

Sekarang, bagaimana nasib umat Islam? Malahan, bagaimana nasib rakyat pada umumnya yang tidak termasuk kaum elite tradisional? Seperti diterangkan di atas, politik kolonial yang digariskan oleh Snouck itu adalah pertama-tama untuk menghancurkan Islam yang merupakan simbol anticolonialisme, dan merupakan *rallying appeal* untuk menentang setiap kezaliman. Oleh karena itu mudah dipahami, bahwa umat Islam, sebagai obyek politik, menjadi golongan yang paling dirugikan. Kaum koloninl mangasingkan mereka, dan sebaliknya mereka, karena kebenciannya kepada Belanda dan segala sesuatu yang berbau Belanda, menempuh jalan non-kooperasi dan non-asosiasi. Umat Islam meneruskan pendidikan tradisional mereka sendiri, dan mengembangkannya dalam suatu persaingan yang hebat dengan pendidikan Belanda. Sebaliknya, kaum Asosiasionis (orang-orang yang ikut serta dalam administrasi dan pemerintahan kolonial), yaitu kaum intelektual dan kaum priyayi, mulai membenci, malahan memusuhi segala sesuatu yang berasal dan berbau Islam. Umat Islam dan pemimpin-pemimpinnya, yaitu kaum alim-ulama, menjadi sasaran kaum "intelektual" dan kaum

priyayi, sebagai hasil terpenting pendidikan kolonial yang mereka peroleh, untuk dijadikan bahan ejekan dan sinisme.

Akan tetapi dengan demikian, justru semangat patriotisme dan antikolonialisme menjadi semakin berkobar di kalangan rakyat di bawah pimpinan kaum ulama, yang kelak menjadi bibit gerakan-gerakan politik revolusioner Islam, malahan menjadi bibit seluruh gerakan patriotik bangsa Indonesia. Apalagi setelah ada beberapa orang dari mereka yang berpendidikan di sekolah-sekolah Belanda itu. Sebagai kekecualian dari keadaan umumnya, dan karena berhasil mempertahankan kepribadian Islamnya, mereka ikut serta dengan rakyat dalam perjuangan patriotik melawan Belanda, bahkan memimpinya. Mereka itu, untuk menyebutkan beberapa orang saja, ialah H.O.S. Cokroaminoto, H.A. Salim, K.H.M. Mansyur, Dr. Sukiman, Moh. Natsir, dan lain-lain.

Karena derasny arus pendidikan kolonial yang membahayakan kepribadian nasional itu, maka timbullah kekhawatiran di kalangan pemimpin-pemimpin rakyat yang mempunyai rasa tanggung jawab besar kepada nasib bangsa di masa depan. Maka tampillah mereka itu dengan konsepsi-konsepsi mereka tentang pendidikan nasional, antara lain Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswa-nya. Para ahli pendidikan Islam pun tampil pula, sehingga tumbuhlah di sana-sini sekolah-sekolah atau madrasah Islam dengan gaya modern (rasional, efisien), seperti yang terdapat di banyak tempat di Sumatra Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Sekarang bangsa Indonesia sudah merdeka, malahan sudah hampir seperempat abad. Sudahkah pendidikan di Indonesia, yang kebanyakan diwarisi dari zaman kolonial, digantikan dengan pendidikan nasional? Kiranya masalah ini adalah masalah pengisian kemerdekaan, yang tampaknya lebih sulit melaksanakannya, daripada merebut dan memperoleh kemerdekaan itu sendiri. Dan di sini-lah kita menghadapi rintangan-rintangan yang beraneka ragam.

Sebagai sekadar contoh, dalam rangka nasionalisasi pendidikan, kita kembali betapa perjuangan menggantikan bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia di perguruan-perguruan tinggi, yang di-

pelopori oleh Muh. Yamin dulu, menghadapi tantangan-tantangan dari pihak kaum terpelajar waktu itu, dengan alasan bahwa bahasa Indoesia tidak akan mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Maka kalau masalah penggantian bahasa saja sudah ditentang sedemikian, apalagi masalah yang lebih penting dan mendasar dari itu, yaitu masalah jiwa pendidikan itu sendiri. Umpamanya, dalam rangka mengikis sisa-sisa aspirasi kolonial dalam pendidikan, rakyat menuntut agar di semua sekolah diajarkan agama sebagai ajaran wajib. Meskipun tidak lancarnya pengajaran dan pendidikan agama itu, di satu pihak, karena ketidakmampuan umat Islam itu sendiri (akibat tidak adanya pendidikan yang cukup, sebagai hasil politik Belanda), tetapi yang tidak kurang pula pentingnya ialah halangan dan rintangan yang berupa individu-individu yang kebetulan masih mempunyai peranan dalam lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Sebab sampai sekarang pun, banyak individu yang memegang peranan dalam pendidikan itu masih terus merupakan pelanjut-pelanjut jiwa dan semangat Snouckisme, baik secara sadar maupun tidak sadar.

Agaknya seperempat abad belum cukup lama bagi terjadinya suatu perubahan mendasar dan menyeluruh, tidak saja di bidang pendidikan, tetapi juga di seluruh sektor kehidupan bernegara kita. Pengindonesiaan kehidupan bernegara itu, seperti dikatakan oleh Gerald S. Maryanov dalam bukunya, *Politics Indonesia: An Interpretation*, masih baru berarti penggantian petugas-petugas Belanda dengan orang-orang Indonesia. Keadaan ini kiranya tidaklah begitu aneh, mengingat golongan yang berperan dalam Indonesia merdeka ini pun, kebanyakan, seperti sudah disinggung di atas, bagian terbesar hidup mereka dialaminya dalam pemerintah Hindia Belanda. Karena latar belakang pendidikan dan sosial mereka itu, maka Maryanov mengatakan: Dasar untuk mengembangkan kritik-kritik terhadap cara pemerintah itu adalah sedikit, dan tidak ada rencana yang tegas untuk menggantikannya. Bentuk Hindia Belanda tidak dapat disingkirkan begitu saja, mengingat belum ada

gantinya, dan tidak ada waktu untuk mendapatkan pengalaman, sekalipun seandainya hal tersebut dikehendaki.

Jadi jelas, sekalipun pelaksanaan “Snouckisme” tidak menghasilkan seluruh apa yang digambarkan oleh penciptanya, tetapi segi-segi yang berhasil tetap dirasakan sampai masa-masa Indonesia merdeka ini, yang terutama diteruskan dan diwarisi oleh suatu lapisan sempit masyarakat Indonesia yang merupakan kelas atas (elite), ditinjau dari segi politik, dan terutama ditinjau dari segi intelaktualitas atau pendidikan. Sekali lagi, masa seperempat abad rupa-rupanya belum cukup lama untuk terjadinya suatu perubahan besar yang meliputi seluruh segi kehidupan kita, terutama yang bersifat idiil-fundamental.

Nilai-Nilai Keislaman: Harta Berharga Bangsa Indonesia

Dalam keadaan inilah rakyat Indonesia didorong oleh suatu kewajiban mencari kepribadian nasional (*national identity*), sebagai langkah yang pertama-tama harus diambil dalam rangka mengisi kemerdekaan. Sebab, bukanlah Tuhan tidak akan mengubah nasib sesuatu bangsa sebelum mereka mengubah apa yang ada pada jiwa mereka, yaitu yang berupa *set of ideas, attitudes and convictions* (sekumpulan pikiran, sikap dan keyakinan)? Maka di sinilah letak pentingnya penekanan agar kita menjaga orientasi nasional kita. Sebab dengan sendirinya kepribadian nasional itu harus dicari bibit-bibit dan sumber-sumbernya dalam milikan murni nasional.

Di antara milikan nasional itu, secara obyektif, yang paling menonjol ialah keislaman. Keislaman inilah yang telah mampu menjadikan dirinya sebagai simbol kebangkitan bangsa dalam menentang penjajah, semenjak ekspedisi Patih Unus dari Kerajaan Demak untuk mengusir penjajahan Portugis dari Malaka, sampai lahirnya partai dan gerakan politik dengan organisasi massa yang modern yang pertama kali di Indonesia, yaitu partai Syarikat

Islam Indonesia (PSII), di bawah pimpinan Pak Cokro dan Pak H.A. Salim, yang menjadi sumber inspirasi dan aspirasi seluruh gerakan nasional patriotik dan revolusioner di Indonesia menjelang kemerdekaan tahun 1945.

Dari segi inilah kita harus menilai mutlaknya gerakan-gerakan Islam dalam Indonesia merdeka ini, semenjak dari Partai Politik Islam Masyumi sebagai satu-satunya partai politik Islam yang ada sekarang ini, yaitu NU, PSII, Partai Muslimin, dan Perti. Di samping itu, juga organisasi-organisasi massa Islam, baik yang bergerak dibidang pendidikan, kesejahteraan sosial, dan lain-lain, maupun dibidang kemahasiswaan dan kepelajaran.

Organisasi-organisasi kemahasiswaan dan kepelajaran Islam berfungsi sebagai pelengkap pendidikan di sekolah atau fakultas/akademi, untuk lebih memenuhi aspirasi rakyat, serta sebagai penutup jurang pemisah antara intelektualitas hasil pendidikan apa yang sering disebut “sekolah umum”, dan pembinaan kepribadian (*personality build-up*) yang umumnya diperoleh dalam apa yang disebut “pendidikan agama”. Yang paling tidak berfungsi untuk mengembalikan *self respect* mereka sebagai putra-putra umat Islam yang hidup dalam zaman merdeka adalah hasil perjuangan nenek-moyang mereka selama berabad-abad. Dan juga ditanamkan kewajiban moral untuk mengikis habis sisa-sisa Snouckisme yang meracuni kehidupan bangsa Indonesia. Organisasi-organisasi ini bertugas menghilangkan dualisme keislaman dan keterpelajaran (intelektualitas), sehingga terbentuklah kelak sarjana-sarjana Muslim, di mana Islam dan intelektualitas berpadu.

Kalau keislaman sering drujuk, hal itu bukanlah dimaksudkan hendak mementingkan Islam saja, melainkan keyakinan bahwa kembali kepada Ketuhanan Yang Mahaesa merupakan konsistensi mutlak pendasaran segala permasalahan kepada Pancasila. Sudah ditegaskan, bahwa kami, bersama dengan banyak orang di Indonesia ini, berpendapat bahwa Ketuhanan Yang Mahaesa merupakan sila primer dan sumber Pancasila. Sedangkan konkretisasi kembali

kepada Tuhan Yang Maha Esa ialah kembali kepada ajaran-ajarannya, dalam hal ini ialah agama Allah.

Dan lagi, keislaman merupakan milik nasional kita paling banyak berpengaruh. Oleh karena itu, penonjolan keislaman hanyalah merupakan penonjolan milik nasional yang paling penting. Barangkali inilah yang disebut *ideology-oriented*. Agaknya memang demikianlah keadaannya. Dan kita akan mempertahankan kebebasan kita untuk berideologi, sebab hal ini termasuk kebebasan menganut keyakinan, asalkan masih konsisten dengan dasar negara. Karena, hidup tanpa keyakinan adalah tidak mungkin.

Mereka yang kini mengajak meninggalkan ideologi, dan berupaya menggantinya dengan program, pun menganut suatu keyakinan. Keyakinan mereka ialah sekularisme, atau humanisme, atau pragmatisme. Sebab, kesemuanya itu konsisten. Bukankah William James *Pragmatism, A New Name for Some Old Ways of thinking?* Bukankah Horace Kallen menulis *Secularism is the will of God?* Bukankah Charles Francis Petter menulis *Humanism, A New Religion?* dan seterusnya, yang sudah disebutkan di bagian lain. Maka mengajak bekerja semata-mata secara programatis dan meninggalkan ideologi, pada hakikatnya, mengajak menukar ideologi masing-masing orang atau golongan dengan ideologi-ideologi baru tersebut. Jadi, pada hakikatnya, mereka juga *ideology-oriented*. Kita bukannya menolak orientasi program, tetapi program itu harus didasarkan kepada ideologi yang menjadi keyakinan masing-masing. Kita tidak menolak pragmatisme, tetapi pekerjaan-pekerjaan harus dilakukan dengan cara pragmatisme tanpa meninggalkan norma-norma. Sebab jika tidak demikian, kita akan terjerumus ke dalam jurang “tujuan menyucikan cara”, atau tidak ada lagi pertimbangan halal-haramnya cara, asalkan tujuannya tercapai.

Sungguh, setiap orang harus menyatakan kekagumannya atas kecermelangan konsepsi Snouck Hurgronje dalam upaya mengurangi dan, akhirnya, menghancurkan pengaruh Islam di Indonesia, serta atas kesungguhan Pemerintah Kolonial Belanda untuk melaksanakannya, sehingga berhasil dengan baik. Sampai-

sampai setelah Belanda pergi hampir genap seperempat abad pun, peninggalan idiilnya masih juga menancap kukuh kuat di dalam masyarakat tertentu: penerus dan pewaris kaum elite tradisional zaman kolonial. Sampai sekarang, masih saja kepala umat Islam dibenturkan ke tembok-tembok tebal dan dinding-dinding penyakit-penyakit Islamo-phobia. Karena takutnya kepada Islam inilah, Sukarno dulu sangat menunjang ideologi yang menjadi lawannya, yaitu ideologi Marxisme-Leninisme (Komunisme), sehingga umat Islam Indonesia, paling tidak sebagian pemimpinnya, menjadi sasaran cap kontra-revolusi dan anti-Pancasila. Dan sekarang ini, di zaman Orde Baru, kaum Islami-phobia dari jurusan lain, tetapi juga merupakan ahli-waris langsung Snouckisme, masih menunjukkan kegigihan mereka untuk menghalangi perkembangan Islam yang sedang tumbuh itu. Apalagi ternyata mereka itu pun, sedikit-banyak, juga menjadi pengikut ajaran Karl Marx. Meskipun barangkali tanpa ajaran Lenin.

Karena umat Islam membawa keyakinan (ideologi), yaitu Islam, maka diusahakan agar ideologi-*oriented* ditinggalkan dan diganti dengan program-*oriented*. Hal itu adalah dalam rangka perombakan struktur politik, katanya, dan juga dalam rangka modernisasi. Sebab, ketidakberesan sekarang ini disebabkan oleh struktur politik yang masih ala Nasakom. Padahal, siapa pun yang berani terhadap dirinya sendiri, untuk bersikap jujur, tentu mengakui bahwa ketidakberesan kehidupan politik sekarang ini disebabkan oleh peranan berlebihan golongan yang tidak mendapatkan dukungan luas rakyat (minoritas), dan dihalang-halangi golongan mayoritas untuk ikut berperan secara menentukan, atau walaupun ada, peranan mereka tidak seimbang dengan kenyataan mereka sebagai mayoritas. Dan minoritas-mayoritas sekarang ini didasarkan pada pembagian ideologi, bukan program. Atau apakah karena keadaan-keadaan itu, maka timbul isu agar kita meninggalkan ideologi dan menggantinya dengan program-program semata? Sehingga kalau hal itu terjadi, maka golongan minoritas yang *notabene* sampai hari ini masih merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang paling baik pendidikannya itu,

dapat memimpin dalam rangka mempertahankan kedudukan dan hak-hak istimewa mereka sekarang ini? Bukankah senjata kita untuk menghancurkan Soekarno dan Orde Lama dulu ialah demokrasi? Bukankah demokrasi itu, sebagaimana dikatakan oleh John Stracey, ialah suatu *representative government*? Dan bukankah pemerintah yang representatif ialah pemerintahan oleh mayoritas (*government by majority*), walaupun bukan oleh seluruh rakyat?

Kemudian dikatakan bahwa sekarang ini adalah masa transisi. Baiklah, dan kita pun setuju dan bersyukur bahwa hal itu diakui sendiri oleh Jenderal Soeharto ketika memberikan penerangan bahwa tidak sedikit pun maksud untuk memperpanjang masa transisi itu. Tetapi sungguh kita mengkhawatirkan bahwa golongan-golongan tertentu yang sekarang ini sedang baik sekali kedudukannya, padahal tidak memperoleh dukungan rakyat, akan mempergunakan kesempatan masa transisi ini untuk memenangkan strategi mereka, persis seperti PKI dulu berbuat terhadap pemerintahan Soekarno. Maka yang kita khawatirkan ialah bahwa segala sesuatu yang kita anggap sebagai norma-norma Orde Baru, kelak akan diselewengkan untuk mengabdikan kepada Orde Lama dengan PKI-nya. Dan kita sepenuhnya merasa berhak menyatakan kekhawatiran yang amat sangat ini, karena kekhawatiran itu adalah kewaspadaan. Sebab kita tidak mau kehilangan tongkat untuk kesekian kalinya.

Dan kekhawatiran itu akan selamanya tetap ada, sebelum adanya jaminan bahwa apa yang dikhawatirkan itu benar-benar tidak akan terjadi. Jaminan itu ialah adanya pemerintahan yang representatif, yaitu pemerintahan yang didukung oleh rakyat yang terorganisasikan. Sebab, seperti juga dikatakan oleh John Stracey: "Pemerintah oleh seseorang yang lain, pada ujungnya, selalu akan berubah menjadi pemerintahan menurut kepentingan orang lain itu. Kalau kita membiarkan usaha pemerintahan oleh satu orang, atau lebih sering lagi oleh suatu kelompok orang tertentu, maka dia atau mereka itu akan selalu mengeksploitasi kita. Biar bagaimanapun sulitnya memperoleh pengaturan yang efektif, yang dengannya rakyat dapat memerintah dirinya sendiri, sekalipun secara tidak

langsung, hal itu pada akhirnya akan terbukti merupakan satu-satunya pengaturan politik yang dapat ditenggang”.

Kekhawatiran itu sangat baralasan, berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, dan karena melihat secara konkret isu-isu yang pernah terlontar ke masyarakat, yang sumbernya dapat diketahui dengan pasti.

Penutup

Akhirnya, marilah kita tetap tabah dan waspada dalam perjuangan yang berat ini. Sekalipun sepenuhnya kita beriman kepada datangnya pertolongan Allah, *wali al-Mu'minin*, namun Allah juga mewajibkan kita untuk berikhtiar sekuat tenaga agar pertolongan itu diturunkan. Segala kekurangan yang kita derita sampai sekarang ini, yang tidak lain merupakan warisan penjajahan (*colonial legacy*), kita perbaiki dan tutup sedikit demi sedikit, untuk kemudian kita hilangkan sama sekali. Maka untuk maksud ini, sebagai umat Islam, kita harus pandai belajar dari pengalaman kita sendiri dan pengalaman orang lain. “Hikmah adalah barang hilangnya orang-orang Mukmin, maka barangsiapa menjumpainya, hendaknya memungutnya”, demikian sabda Nabi kita.

Kekurangan itu ialah, antara lain yang terpenting dan terpenting bahwa kita memercayai dan meyakini sepenuhnya akan kemutlakan Kebenaran Ajaran Allah, yaitu Islam, tetapi kita tidak banyak sanggup memformulasikannya dalam bahasa-bahasa yang dimengerti umum, dalam ruang dan waktu sekarang ini. Akibatnya, orang lain banyak tidak mengerti dan tidak tahu apa yang kita kehendaki, sehingga jiwa Islamo-phobia akibat kolonialisme itu membuat mereka, sampai sekarang, a priori, tidak mau mengerti ajaran Tuhan Yang Mahaesa itu. Kebanyakan dari kita masih terlalu banyak berbicara tentang apa yang seharusnya (*normatif, ultimate goal*), tetapi tidak atau sedikit saja bicara tentang “apa yang dapat dikerjakan” (*operatif*) dalam ruang dan waktu tertentu

kita. Sehingga Islam yang semestinya menjadi rahmat bagi seluruh alam, malahan sering terbalik dirasakan oleh sementara golongan justru sebagai ancaman. Hal itu barangkali wajar kalau datang dari musuh-musuh Islam. Tetapi bagaimana kalau juga datang dari golongan Islam sendiri, sekalipun Islam nominal? Padahal itulah yang menjadi kenyataan sekarang ini. Adalah tragis sekali, bahwa penentang-penentang Islam justru sebagian besar dari kalangan yang mengaku Islam juga. Meskipun sebab-sebabnya sudah jelas, yaitu karena tidak adanya pengertian yang benar tentang Islam, atau boleh juga karena memang dapat dipergunakan oleh musuh-musuh Islam, sadar atau tidak.

Demi perbaikan kita sendiri pula, maka kita harus berpegang teguh kepada jiwa dan semangat surat *al-'Ashr*, yaitu semangat kesediaan untuk menerima kritik, biar datang dari mana saja, baik dari orang lain, dan terutama dari diri sendiri. Kita harus berani mengakui dengan jujur bahwa cara bekerja kita sampai sekarang ini masih jauh dari sempurna. Seperti disinggung di muka, kita belum banyak sanggup menggabungkan antara iman yang memberikan kepada kita pedoman-pedoman normatif, dan ilmu yang memberikan kepada kita kecakapan-kecakapan operatif. Bukankah dalam surat *al-Jātsiyah* Allah menegaskan bahwa Dia akan memenangkan golongan manusia — mereka yang menggabungkan iman dan ilmu — atas golongan lain? Iman memberikan kepada kita landasan ideologi yang kuat, dan ilmu pengetahuan melengkapi kita dengan kecakapan teknis yang tinggi. [❖]